

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat kaya akan sumber daya alam. Hingga tahun 2024, tercatat luas kawasan hutannya mencapai kurang lebih 95,5 juta hektare, yang mencakup 51,1% dari total wilayah daratan nasional. Dari total tersebut, sekitar 87,8 juta hektare atau 91,9% di antaranya termasuk dalam kawasan hutan yang diakui secara resmi (Forest Insights, 2025). Keberadaan kawasan hutan ini tidak hanya berperan dalam menjaga keseimbangan lingkungan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung kehidupan masyarakat lokal yang tinggal di sekitarnya (Suhartati et al., 2019, 2021). Namun, tantangan pengelolaan hutan di Indonesia masih sangat besar, seperti deforestasi, degradasi hutan, serta konflik tenurial antara masyarakat lokal dengan pihak luar. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah mendorong program perhutanan sosial, salah satunya melalui skema Hutan Desa, yang bertujuan memberikan hak kelola kepada masyarakat desa agar dapat memanfaatkan hutan secara lestari dan meningkatkan kesejahteraan mereka (World Agroforestry Centre, 2019).

Di Provinsi Kalimantan Barat, penerapan skema Hutan Desa menjadi sangat relevan mengingat wilayah ini memiliki kawasan hutan yang luas dan masyarakatnya sangat bergantung pada sumber daya hutan. Namun, implementasi Hutan Desa di Kalimantan Barat masih menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya pemahaman masyarakat terhadap konsep Hutan Desa, ketidakjelasan batas wilayah, serta belum terintegrasinya pengelolaan

hutan dengan pembangunan desa. Sebuah studi CIFOR menunjukkan bahwa banyak masyarakat desa di Kalimantan Barat belum memahami secara utuh mekanisme, tujuan, dan manfaat dari program Hutan Desa, sehingga menimbulkan potensi konflik dan ketidakpuasan terhadap penyebaran informasi oleh Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD).

Desa Tanjung Beulang yang berlokasi di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, merupakan salah satu wilayah dengan prospek pengelolaan Hutan Desa yang cukup kuat. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik tahun 2024, desa ini memiliki luas wilayah mencapai 91,41 km², dengan sebagian kawasannya telah diajukan untuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat (Badan Pusat Statistik Kabupaten Ketapang, 2024). Komunitas desa sebagian besar bekerja di sektor agraris, khususnya sebagai petani karet, buruh sawit, peternak, serta pengambil kapur dondang. Tak hanya itu, pemanfaatan hasil hutan non-kayu seperti madu, kopi, damar, rotan, dan tanaman herbal juga menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari dan warisan tradisi lokal yang terus dipertahankan.

Nilai-nilai adat dan budaya masyarakat Tanjung Beulang sangat erat kaitannya dengan hutan. Hutan tidak hanya menjadi sumber ekonomi, tetapi juga bagian dari identitas budaya dan spiritual masyarakat setempat. Hutan desa memiliki banyak potensi yang belum tergali, seperti air terjun, tanaman obat, dan madu. Namun, masyarakat juga mengkhawatirkan berkurangnya luas hutan akibat ekspansi pembangunan, yang dapat mengancam sumber kehidupan dan kelestarian budaya mereka.

Persepsi masyarakat terhadap rencana penetapan hutan desa menjadi aspek krusial dalam mendukung keberhasilan implementasi program perhutanan sosial di Indonesia (Andini & Masrilurrahman, 2023; Fajar Ahmadi Depari *et al.*, 2020; Putri *et al.*, 2025). Persepsi masyarakat Desa Tanjung Beulang terhadap rencana penetapan Hutan Desa sangat beragam. Sebagian besar masyarakat berharap dapat memanfaatkan sumber daya hutan secara legal dan berkelanjutan, serta memperoleh manfaat ekonomi melalui pengembangan usaha desa berbasis hasil hutan. Namun, terdapat pula kekhawatiran terkait kurangnya pemahaman terhadap mekanisme pengelolaan Hutan Desa dan potensi konflik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, pemetaan persepsi masyarakat menjadi sangat penting untuk merumuskan strategi implementasi Hutan Desa yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan tanpa mengabaikan aspek sosial-budaya dan lingkungan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi masyarakat Desa Tanjung Beulang terhadap rencana penetapan Hutan Desa?
2. Bagaimana harapan masyarakat terhadap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari penetapan Hutan Desa?

C. Tujuan Penelitian

- 1 Menganalisis persepsi masyarakat Desa Tanjung Beulang terhadap rencana penetapan Hutan Desa.

- 2 Menggali harapan masyarakat terkait rencana penetapan Hutan Desa di Desa Tanjung Beulang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya yang membahas persepsi masyarakat terhadap kebijakan lingkungan di wilayah pedesaan. Penelitian ini juga dapat memperkaya literatur mengenai pengelolaan Hutan Desa di Indonesia, sekaligus menguji teori-teori yang berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap kebijakan lingkungan. Penelitian ini pada akhirnya diharapkan tidak hanya berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi panduan praktis bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan hutan berbasis masyarakat di wilayah pedesaan.